

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang, yang sedang melakukan pembangunan dalam segala bidang. Pembangunan ini dilaksanakan baik dipertanian maupun dipertanian. Pembangunan masyarakat pedesaan merupakan bagian dari pembangunan masyarakat yang diarahkan kepada pembangunan kelembagaan dan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan pada satuan wilayah pedesaan. Program dan kegiatan pembangunan pedesaan secara menyeluruh menyangkut bidang ekonomi, sektor-sektor pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan bidang sosial budaya dan lain-lain.

Perkembangan suatu daerah pedesaan menuju suatu perkotaan tidak mungkin terjadi secara drastis tetapi melalui suatu proses dimana daerah tersebut akan melewati suatu kondisi transisi. Kondisi transisi adalah dimana daerah tersebut dapat di katakan kota tetapi belum memenuhi ukuran yang ada, sedangkan untuk dapat di katakan sebuah desa sudah mulai menunjukkan kondisi kota. Daerah yang berada pada kondisi transisi desa dan kota memiliki potensi untuk memacu perkembangan daerah sekitarnya. Penentuan distribusi daerah transisi desa dan kota dapat di gunakan oleh pemerintah daerah untuk membuat kebijakan pengembangan wilayah yang lebih baik.

Pengembangan pedesaan harus selaras dengan pembangunan daerah maju sekitarnya, selain itu perlu diperhatikan sarana transportasi di desa tersebut, dengan demikian arus barang ataupun jasa, barang dan bahan makanan dapat dengan

mudah dan lancar keluar masuk (Bintarto, 1997). Perkembangan desa juga ditopang oleh masyarakat yang mendiami maupun yang datang, karena dipundak merekalah berdiri barisan-barisan perubahan laju perkembangan desa yang dapat menghambat maupun mendukung pembangunan desa yaitu dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di desa tersebut. Secara umum berkembang tidaknya suatu desa dapat diukur dengan indikator perkembangan desa.

Desa diibaratkan sebuah sumber yang memercikkan segala potensi alam yang dikelola oleh masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhannya. Petani berharap banyak dari alam, penambang berburu isi bumi dari alam, pelaut (nelayan) pergi berlayar mendapatkan hasil tangkapan dari alam. Warga kota mengharapkan hasil alam dari desa (dari sektor pertanian) berupa bahan makanan (*food*) dan bahan mentah (*raw material*), dan semua bermula dari wilayah desa dan pesisir (Hasid, 2010). Di luar dari segenap urgensi keberadaan dan potensi alam yang dimilikinya, desa masih identik dengan ketertinggalan, karena akses dasar masih begitu minim, sehingga membuat orang-orang tak berdaya untuk mengaktualisasikan segenap potensi yang dimilikinya (Sajogyo dan Pudjiwati, 1983).

Perkembangan wilayah berkenaan dengan dimensi spasial (ruang) dari kegiatan pembangunan. Didasari pemikiran bahwa kegiatan ekonomi terdistribusi dalam ruang yang tidak homogen, oleh karena lokasi memiliki potensi dan nilai relatif terhadap lokasi lainnya, maka kegiatan yang bertujuan ekonomi maupun sosial akan tersebar sesuai dengan potensi dan relatif lokasi yang mendukungnya. Dalam pembangunan suatu wilayah, perencanaan adalah suatu hal yang utama sebab dengan perencanaan yang tepat akan menimbulkan dampak positif terhadap daerah itu sendiri. Perencanaan yang tepat adalah sebuah perencanaan yang dibuat

atas dasar potensi atau keunggulan yang dimiliki daerah tersebut. Perencanaan akan menjadi bahan dalam membuat sebuah kebijakan pembangunan yang mendukung perencanaan tersebut (Luthfi, 1994).

Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kondisi wilayah perdesaan masih jauh tertinggal dari wilayah perkotaan baik dari kualitas infrastruktur, komunikasi dan informasi, ketersediaan fasilitas umum serta pelayanan publik. Selain itu terjadinya penyebaran fasilitas sarana dan prasarana umum yang tidak merata atau hanya tersedia di beberapa desa semakin memperburuk kondisi desa-desa yang tertinggal. Kondisi ini mengakibatkan lahirnya berbagai kesenjangan baik dari aspek kesejahteraan, pendidikan, wawasan, informasi dan lain sebagainya. Pada saat yang bersamaan seiring waktu masyarakat sangat membutuhkan adanya peningkatan kesejahteraan, peningkatan wawasan, kualitas pendidikan dan layanan lainnya yang tidak didapat secara layak di desanya, sehingga mendorong mereka untuk mendekati perkotaan atau berpindah ke wilayah perkotaan.

Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat di Sumatera Utara dengan luas wilayah 2.497,72 Km² (249,772 Ha) atau merupakan 3,34% dari luas Propinsi Sumatera Utara. Secara administratif terdiri dari 22 Kecamatan dengan jumlah 394 Desa/Kelurahan (380 desa dan 14 kelurahan). Dengan posisi strategis, sumber daya alam dan tenaga kerja yang dimiliki oleh Kabupaten Deli Serdang akan menjadi potensi yang dapat dikembangkan menjadi keunggulan yang kompetitif dalam menghadapi persaingan dalam menarik investor untuk mengembangkan usaha di daerah ini dan sasaran lainnya dalam memasarkan produk/jasa yang dihasilkan. Visi misi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang 2004-

2009 sektor pendidikan dan kesehatan serta sektor pembangunan infrastruktur merupakan prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan tanpa mengabaikan pembangunan sektor lainnya.

<http://deliserdangkab.go.id/statis-15-gambaranumum.html> (diakses 04 April 2015 Jam 10.22 WIB).

Desa Tembung dengan luas 535 Ha berada di Kecamatan Percut Sei Tuan merupakan salah satu desa yang berkembang di kawasan pinggiran Kota Medan. Dengan melihat potensi pendukung seperti letak di pinggiran Kota Medan, Desa Tembung juga dekat dengan pusat pemerintahan, serta pusat-pusat pendidikan. Perkembangan yang tampak jelas adalah terkait dengan penggunaan lahan, yang dahulunya adalah lahan pertanian berubah menjadi pemukiman. Perubahan lahan pertanian menjadi pemukiman tersebut menjadikan lahan pertanian semakin berkurang, selain itu telah banyak berdiri bangunan perkantoran, mini market, *showroom*, dan tempat bimbingan belajar. Perkembangan yang terjadi akibat adanya pembangunan di desa Tembung merupakan pembangunan yang mengarah ke positif namun menimbulkan masalah yakni berkurangnya lahan pertanian yang memaksa masyarakat untuk beralih mata pencaharian ke sektor lain.

Bandara Internasional Kuala Namu yang beroperasi sejak 25 Juli 2013 menjadikan desa Tembung sebagai jalur lintasan utama transportasi dari Kota Medan menuju bandara via Batang Kuis, baik secara langsung maupun tidak langsung pada masa yang akan datang Desa Tembung akan terkena dampak perkembangan kota dan mengubah struktur sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2007 tentang pedoman penyusunan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan untuk melihat perkembangan sebuah desa digunakan 10 indikator yaitu: (1) Perkembangan Penduduk (2) Ekonomi masyarakat (3) Pendidikan masyarakat (4) Kesehatan masyarakat (5) Keamanan dan ketertiban (6) Kedaulatan politik masyarakat (7) Peranserta masyarakat dalam pembangunan (8) Lembaga kemasyarakatan (9) Kinerja pemerintahan desa (10) Pembinaan dan pengawasan, dengan menggunakan sepuluh indikator tersebut dapat diketahui sejauh mana perkembangan sebuah desa apakah termasuk tipe desa tradisional(desa kurang berkembang), desa swadaya(desa lambat berkembang), desa swakarya(desa berkembang), atau desa swasembada(desa cepat berkembang).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah ; (1) perkembangan Desa Tembung Tahun 2009 dan 2014 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2007 (2) potensi dan kendala yang di hadapi dalam perkembangan Desa Tembung (3) fungsi Desa Tembung sebagai hinterland Kota Medan.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, masalah dalam penelitian ini dibatasi pada perkembangan Desa Tembung Tahun 2009 dan 2014 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2007.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah : Bagaimana tingkat perkembangan Desa Tembung Tahun 2009 dan 2014 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2007 ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat perkembangan Desa Tembung Tahun 2009 dan 2014 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2007.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan sumbangan teoritis bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam pengkajian Geografi Desa Kota.
2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Desa Tembung dalam usaha mengambil keputusan untuk pengembangan Desa Tembung pada masa mendatang.
3. Sebagai studi pembandingan bagi peneliti lain pada objek yang sama dengan tempat yang berbeda demi penyempurnaan selanjutnya.
4. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.